

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Implementasi *whistleblowing system* pada PT. Pembangkitan Jawa-Bali dikelola oleh pihak Komite Pengelola Pengaduan Pelanggaran, TP2DK, dan Yang Berwenang Memberikan Sanksi. Pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan atau prosedur yang telah ditentukan dalam SKB Direksi dan Dewan Komisaris PT. Pembangkitan Jawa-Bali Nomor : 095.K/010/DIR/2012 Nomor : 007.K/DK/PJB/2012 tentang Sistem Pelaporan Pelanggaran (*whistleblowing system*) PT. Pembangkitan Jawa-Bali.

Dengan adanya *whistleblowing system* ini maka dapat menunjang pelaksanaan kelima prinsip *good corporate governance* di PT. Pembangkitan Jawa-Bali, selain itu dapat mendeteksi kecurangan secara dini atau *early warning system*, dan dapat melaksanakan *good governance* secara efektif.

2. Penegakan *whistleblowing system* di PT. Pembangkitan Jawa-Bali telah dilaksanakan Sistem pelaporan pelanggaran atau *whistleblowing system* ini sesuai dengan ketentuan teori penegakan hukum yang ada, yang pada intinya harus memiliki asas, kaidah, lembaga dan proses; dan PT.

Pembangkitan Jawa-Bali telah memenuhi keempat unsur tersebut. Namun dalam penegakannya sangat disayangkan pelaporan yang diterima namun tidak disertai identitas masih belum di proses padahal ada kebijakan bahwa pelaporan diperbolehkan tidak disertai identitas.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan oleh penulis terdapat beberapa saran yang ingin disampaikan penulis terkait dengan permasalahan yang dikaji oleh penulis, adapun saran-saran tersebut adalah:

1. Kepada Pemerintah yang dalam hal ini Kementerian yang membawahi bidang usaha PT. Pembangkitan Jawa-Bali yaitu Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, agar dapat membuat suatu peraturan yang secara eksplisit atau secara khusus mengatur mengenai sistem dan mekanisme *whistleblowing system* atau peraturan secara khusus untuk *whistleblower* agar dapat meningkatkan minat perusahaan-perusahaan untuk mengimplementasikan *whistleblowing system* secara efektif.
2. Kepada PT. Pembangkitan Jawa-Bali, diharapkan dapat mengembangkan sistem pelaporan pelanggaran atau *whistleblowing system* dan juga mekanismenya yang sudah ada agar dapat berjalan lebih efektif dan efisien

lagi, misalnya seperti akan memproses dan membuat mekanisme khusus mengenai pelaporan yang tanpa identitas pelapor.